



Impact Investing Report

Menumbuhkan Nilai, Mewujudkan Manfaat BPKH 2025

Impact Investing Report 2025

© 2025 — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia (RI)

Penulis :

Center for Environmental, Social, and Governance Studies

Kontributor:

- Erwinda Anggraini J.
- Dyah Puspita Rini
- Sri Yanto
- Dio Darmawan
- Khansa Diva Rania
- Ahmad Firdaus Zulva

Diterbitkan oleh:

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia (RI)

Alamat:

Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18,
Jakarta Selatan/South Jakarta 12940

Kontak:

Email: info@bpkh.go.id
Website: www.bpkh.go.id

Sambutan Anggota Badan Pelaksana BPKH

“

Dana umat bukan hanya dijaga, tetapi dihadirkan sebagai kekuatan yang memberi manfaat bagi manusia, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.”



Dr. Indra Gunawan

Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga, Investasi Emas, Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi, dan Penempatan

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,**

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut hadirnya *Impact Investing Report BPKH 2025*. Laporan ini bukan sekadar rangkuman kinerja, tetapi cerminan bagaimana dana umat dapat dikelola secara amanah, profesional, dan memberikan dampak nyata—serta menjadi contoh bagi praktik sustainable dan sharia-based finance di tingkat global.

Sepanjang periode pelaporan, BPKH terus memperkuat fondasi pengelolaan investasi. Portofolio dana umat semakin matang melalui sinergi strategis antara DAU dan BPIH, dengan penempatan pada instrumen sukuk, emas, reksa dana syariah, investasi langsung, hingga perbankan syariah. Diversifikasi ini memastikan dana tetap terjaga sekaligus memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penerbitan *Green Sukuk*, *Orange Sukuk*, dan *Social Sukuk* menegaskan posisi BPKH sebagai pelopor inovasi pembiayaan tematik di Indonesia. Instrumen tersebut mendukung konservasi dan energi terbarukan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi, hingga berbagai program sosial yang menjangkau masyarakat luas. Upaya ini melengkapi pencapaian penting sebelumnya, termasuk peluncuran CWLS pertama pada tahun 2023 yang meraih

penghargaan *Best Islamic Finance Deal of the Year* dari IsDB—tonggak bersejarah dalam pengembangan wakaf produktif nasional.

Dampak sosial yang dihasilkan menjadi ukuran utama keberhasilan kami. Melalui program pembangunan fasilitas pendidikan di Aceh, rehabilitasi konservasi di Gunung Gede Pangrango, hingga pemberdayaan UMKM bersama PT PNM, BPKH menghadirkan manfaat yang konkret bagi masyarakat. Capaian ini memperkuat prinsip *triple bottom line*: memberikan manfaat sosial, menjaga lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

Seluruh ikhtiar ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BPKH dalam mengintegrasikan prinsip ESG dengan maqashid syariah. *Insyah Allah*, langkah ini semakin memantapkan peran BPKH sebagai rujukan bagi *Sovereign Halal Funds* dan lembaga keuangan syariah dunia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPKH serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan doa, dukungan, dan kontribusi terbaiknya. Semoga setiap upaya yang kita lakukan membawa keberkahan, memperkuat kemaslahatan umat, dan menjaga keberlanjutan bumi yang Allah titipkan kepada kita.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.**

Kata Mereka Tentang BPKH



“

“Kami berharap sinergi DJPPR dan BPKH terus diperkuat demi pengelolaan SBSN yang optimal serta mendukung tujuan bersama dalam pengelolaan keuangan syariah yang kredibel, akuntabel, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi jemaah haji serta masyarakat”

Deni Ridwan, PhD

Direktur Pembiayaan Syariah
DJPPR Kementerian Keuangan RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Keuangan syariah memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui instrumen syariah, pembiayaan publik dapat dikelola secara aman, transparan, dan memberi manfaat luas.

Dalam hal ini, kerja sama investasi antara BPKH dan Pemerintah melalui SBSN menjadi bagian strategis dari penguatan pembiayaan syariah nasional. BPKH sebagai investor strategis SBSN berkontribusi mendukung pembiayaan APBN sekaligus memperkuat stabilitas pasar keuangan syariah. Investasi BPKH

pada Project-Based Sukuk ikut membiayai pembangunan berbagai infrastruktur layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat dan jemaah haji. Ini memastikan dana haji tidak hanya dikelola secara prudent, tetapi juga menghadirkan dampak nyata di lapangan.

Upaya BPKH dalam menyusun Impact Investing Report merupakan langkah konstruktif yang sejalan dengan peningkatan standar pelaporan dan kebutuhan pemangku kepentingan atas informasi yang komprehensif mengenai dampak investasi.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.***



“Kerja sama BPKH dan PNM menunjukkan bahwa dana haji dapat menghadirkan kebaikan yang nyata, membantu masyarakat kecil, dan memberikan harapan baru bagi banyak keluarga”

Sahat Pangabahan

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
PT PNM Persero

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Investasi BPKH menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat kecil. Sepanjang 2025, dana umat yang disalurkan kepada PNM termasuk melalui penerbitan PNM Orange Sukuk telah memperkuat kapasitas pembiayaan dan pendampingan bagi jutaan perempuan nasabah Mekaar di seluruh Indonesia.

Dukungan ini memberikan hasil yang nyata. Dampaknya mengalir seperti lingkaran kebaikan: modal kecil tumbuh menjadi ketahanan keluarga, pendampingan berubah menjadi

keberanian untuk berusaha, dan pembiayaan menjadi jawaban atas doa serta harapan mereka yang selama ini sulit mendapat kesempatan.

Setiap usaha ultra mikro yang berkembang, setiap ekonomi keluarga yang lebih stabil, dan setiap ibu yang kini berani bermimpi lebih besar adalah bukti nyata bahwa social impact investment BPKH memberi multi-effect dan bekerja dengan cara yang paling memanusiaikan manusia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Tentang *Impact Investing Report* BPKH 2025

Impact Investing Report BPKH 2025 disusun sebagai wujud komitmen Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam melaporkan pengelolaan dana umat yang aman, produktif, dan berorientasi keberlanjutan. Laporan ini menampilkan bagaimana kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) diintegrasikan dalam strategi investasi syariah BPKH untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengembangan dana tidak hanya menghasilkan imbal hasil jangka panjang, tetapi juga membawa manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (ESG) yang nyata bagi umat.

Melalui laporan ini, BPKH menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan haji, termasuk langkah-langkah penguatan tata kelola, mitigasi risiko, dan penerapan standar internasional dalam investasi berkelanjutan. Laporan ini juga memberikan gambaran berbagai pencapaian dan dampak investasi berbasis sukuk berkelanjutan seperti *Green Sukuk*, *Social Sukuk*, *Orange Sukuk*, serta instrumen syariah lain yang mendukung pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan konservasi lingkungan.



Impact Investing Report BPKH 2025 menjadi bukti bahwa pengelolaan dana haji dapat berperan lebih luas sebagai katalis kemaslahatan, mendukung fondasi keberlanjutan nasional, sekaligus memastikan setiap rupiah dana umat kembali memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi jamaah dan masyarakat Indonesia

Hubungi Kami

Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18,
Jakarta Selatan/South Jakarta 12940

Email: info@bpkh.go.id
Website: www.bpkh.go.id

Hunting: (021) 837 93001
WA Call Center: +62 821-9090-6002



Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Mengenal BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji atau yang biasa disebut dengan BPKH adalah sebuah lembaga yang diberi amanah untuk mengelola seluruh keuangan haji milik jemaah.

BPKH adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden melalui Kementerian Agama yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang No. 34 tahun 2014. Tugas BPKH meliputi merencanakan, menerima, mengembangkan dan mengawasi penggunaan dana haji. Semua proses ini dilakukan dengan hati-hati mengikuti prinsip syariah, sehingga manfaat yang dirasakan oleh para jemaah tetap halal, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga September 2025, BPKH telah mengelola dana haji sekitar Rp 173 triliun. Dana tersebut dioptimalkan untuk memastikan jemaah memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas layanan ibadah haji, pembangunan fasilitas pendukung, serta perbaikan pelayanan yang terus dilakukan dari tahun ke tahun. BPKH juga memperkuat langkah tersebut melalui investasi pada **SBSN PBSG-001 (Project Based Sukuk – Green)**, sebagai bagian dari kontribusi aktif dalam mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Skala Organisasi

Jumlah Dana
Kelolaan (AUM)

Rp 173
Triliun

Total seluruh
Pegawai BPKH

228
Orang

Entitas Anak

BPKH Limited,
Bank Muamalat Indonesia Tbk

Alamat Kantor Pusat

Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18,
Jakarta Selatan/South Jakarta 12940

Email: info@bpkh.go.id
Website: www.bpkh.go.id



Tentang BPKH

08



Arah dan Tujuan BPKH

BPKH diberi amanah oleh negara untuk mengelola dana haji dengan tujuan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk jamaah dan umat. Tugasnya tidak hanya menerima dan menyimpan dana, tetapi juga merencanakan, mengembangkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh alur keuangan haji. Seluruh kegiatan ini dilakukan agar dana yang dititipkan oleh jemaah dapat berkembang dengan baik, aman dan kembali dengan manfaat yang optimal.

Untuk mewujudkannya, BPKH menjalankan misi yang berfokus pada pengelolaan keuangan yang transparan, modern, aman, dan sesuai dengan syariat agama islam. Dana haji dikembangkan secara hati-hati dan profesional, agar hasilnya bisa mendukung keterjangkauan biaya serta meningkatkan kualitas layanan haji. BPKH juga membangun tata kelola yang akuntabel, dengan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas.

Dalam bekerja, BPKH selalu berusaha untuk berpegang teguh pada nilai bekerja dengan **amanah (Integrity)**, **memberikan layanan yang terbaik (Quality)**, **menghargai jemaah haji dan seluruh pihak (Respect)**, serta siap bertanggung jawab atas setiap keputusan **(Accountability)**.

Nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tetapi secara konsisten diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Karena itu, BPKH juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi seluruh pegawai. Di antaranya menjaga kerahasiaan data jemaah, tidak menyalahgunakan jabatan, menghindari benturan kepentingan, serta memastikan semua keputusan dilakukan dengan integritas.

Seluruh komitmen dan prinsip tersebut dijalankan untuk mencapai tiga tujuan utama: memastikan penggunaan BPIH yang rasional dan efisien, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, serta menghadirkan manfaat yang luas bagi kemaslahatan umat.

Integrity

Quality

Respect

Accountability

I Q O R A



Tata Kelola Investasi ESG BPKH

Landasan Hukum Tata Kelola Dana Haji

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.



Integrasi Investasi BPKH dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (SDGs)

Sebagai lembaga pengelola keuangan umat, BPKH berkomitmen untuk memastikan seluruh pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan prinsip syariah, kehati-hatian, dan keberlanjutan. Dalam menjalankan mandat tersebut, BPKH mengintegrasikan dua kerangka utama: **Environmental, Social, Governance (ESG) serta Maqashid Syariah**, guna memastikan investasi tidak hanya memberikan hasil finansial, melainkan juga memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi senantiasa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam praktiknya, BPKH melakukan investasi pada sukuk ESG yang memberikan manfaat multidimensi bagi jamaah haji. Dari perspektif finansial, diversifikasi portofolio ke dalam instrumen investasi berkelanjutan memberikan peluang bagi BPKH untuk mengoptimalkan nilai dana haji secara jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan pencapaian imbal hasil yang kompetitif dengan profil risiko yang lebih terkelola, karena portofolio BPKH terekspos pada sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan berkelanjutan seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan inklusi ekonomi.

Dari sudut pandang keberlanjutan, alokasi dana haji pada proyek yang berorientasi lingkungan dan sosial menjadi kontribusi terhadap kemaslahatan umat (masalah). Investasi yang bertanggung jawab ini tidak hanya memperkuat dampak sosial-ekonomi, tetapi juga melindungi nilai dana haji dari risiko jangka panjang.

Integrasi prinsip syariah BPKH dalam pengelolaan dan penginvestasian dana haji berjalan seiring dengan UNDP (*United Nations Development Programme*) yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui investasi yang mencakup pemberdayaan perempuan pra sejahtera, penguatan UMKM, perluasan akses energi bersih, konservasi lingkungan, pengembangan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga peningkatan infrastruktur publik, BPKH menempatkan dana umat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai **17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)** dan mendorong pembangunan berkelanjutan bagi jamaah haji dan masyarakat luas dengan memastikan setiap investasi menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (ESG).

17
Kemitraan
untuk Mencapai
Tujuan

16
Perdamaian, Keadilan,
dan Kelembagaan
Tangguh

15
Ekosistem
Daratan

14
Ekosistem
Lautan

13
Penanganan
Perubahan Iklim

12
Konsumsi dan Produksi
yang Bertanggung Jawab

11
Kota dan Permukiman
Berkelanjutan

10
Berkurangnya
Ketimpangan

Industri
dan Infra

**SUSTA
DEVELO
GOAL**

“Hingga kini, BPKH berkontribusi pada 11 (SDGs) yang menunjukkan komitmen BPKH dan lingkungan (ESG) mel

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global
1 dalam menghadirkan nilai sosial, ekonomi,
dan nilai pengelolaan dana haji”



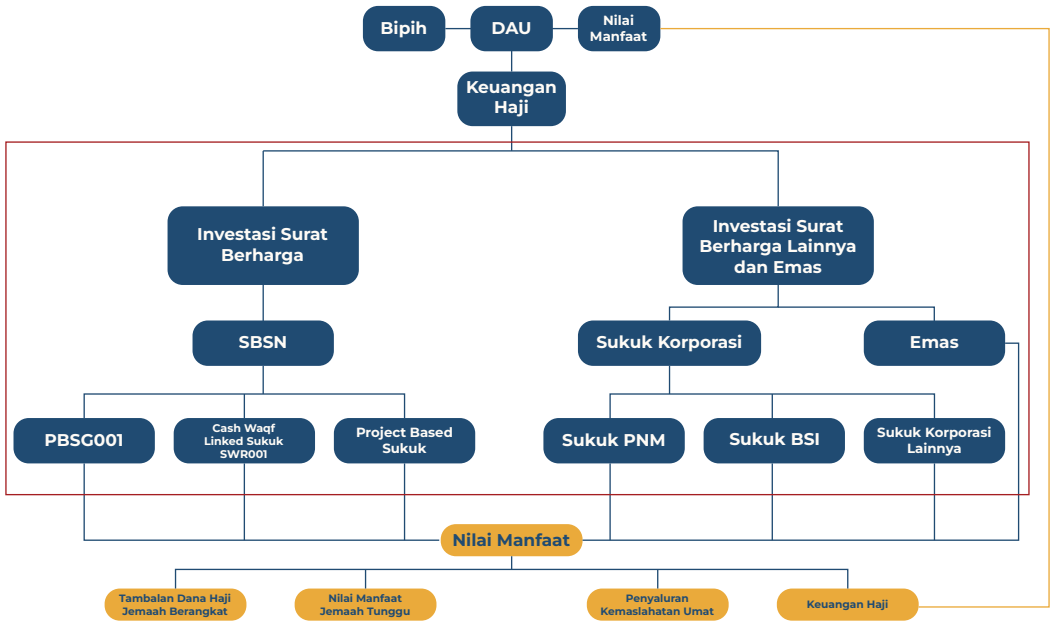
Strategi Investasi BPKH

Strategi investasi BPKH berlandaskan prinsip pengelolaan dana haji yang amanah, profesional, dan sepenuhnya syariah, dengan orientasi menjaga nilai dana sekaligus memaksimalkan kebermanfaatannya. Seluruh kegiatan investasi mengikuti ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 2018, yang mengatur bahwa pelaksanaan investasi haji wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat & likuiditas, dan dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan semakin besarnya dana yang dikelola, BPKH memperluas fokusnya tidak hanya pada pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan sesuai syariah, tetapi juga penguatan nilai keberlanjutan dalam setiap aktivitas investasi. Prinsip ini lahir dari keyakinan bahwa dana umat harus berkembang dengan cara yang tidak hanya

menguntungkan secara finansial, namun juga membawa kebaikan jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pilihan instrumen investasi yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Berbagai instrumen seperti *Green Sukuk*, *Orange Sukuk*, *Social Sukuk*, *Cash Waqf Linked Sukuk*, dan *Project-Based Sukuk* menjadi pilar penting dalam pengembangan portofolio yang menghadirkan manfaat jangka panjang bagi umat. Masing-masing instrumen membawa fokus keberlanjutan yang berbeda mulai dari lingkungan hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi sehingga keseluruhan portofolio bergerak selaras menuju nilai keberlanjutan yang menyeluruh.



Melalui kerangka inilah struktur strategi investasi BPKH tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan tetapi juga memperluas orientasi investasi menuju nilai-nilai keberlanjutan sehingga pengelolaan dana haji semakin bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang meluas bagi umat. Nilai

manfaat yang dihasilkan kemudian dialirkan untuk mendukung pembiayaan jemaah berangkat, mengembangkan dana jemaah tunggu, mengembangkan program kemaslahatan umat, dan menjaga keberlanjutan keuangan haji sehingga seluruh hasil investasi dana benar-benar kembali kepada umat.



Manajemen Risiko Investasi BPKH

BPKH mengelola dana haji dengan sistem manajemen risiko yang kuat dan berstandar internasional untuk memastikan seluruh investasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penerapan berbagai sertifikasi, seperti **ISO 37001** tentang anti-korupsi dan **ISO 9001** tentang manajemen mutu, turut memperkuat integritas dalam seluruh proses investasi.

Konsistensi penerapan tata kelola ini tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun

berturut-turut (2018–2024) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang menegaskan keandalan pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal BPKH. Melalui mekanisme pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sistem *whistleblowing*, BPKH memastikan seluruh aktivitas investasi dapat diawasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan fondasi ini, BPKH menjaga agar dana haji tetap aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah.

Sertifikasi

Area Fokus	Sertifikasi	Tujuan
Integritas & Anti-Korupsi	ISO 37001	Transparansi & Pencegahan suap
Kualitas & Efisiensi	ISO 9001	Proses berkualitas & Kepuasan stakeholder



Capaian Kinerja Tata Kelola

Nilai Manfaat dan Pengelolaan Nasabah

- Total penyaluran nilai manfaat virtual account mencapai Rp16 triliun sejak 2018 - Sept 2025.
- Total nilai manfaat BPIH sebesar Rp70,0 triliun sejak 2018 - September 2025.
- Total nilai manfaat Dana Abadi Umat sebesar Rp1,85 triliun sejak 2018 - September 2025.
- Pengelolaan investasi Dana Haji berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

Perlindungan Dana Jamaah

Konfirmasi tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas jaminan deposito jemaah haji, sesuai UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Optimalisasi Kebijakan Perpajakan

Pengecualian pajak untuk instrumen deposito dan investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 dan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, guna meningkatkan hasil pengelolaan investasi

Kinerja Keuangan dan Penghargaan

Opini WTP dari BPK RI selama 7 tahun berturut-turut (2018–2024).



Penghargaan



2023

Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat

BAZNAS Award 2023

Penyelenggara :
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Public Relation Award 2023

1. Silver Winner Annual Report
2. Bronze Winner Video Profile

Penyelenggara :
PR Indonesia

Lembaga Penggerak Ekonomi Syariah

Anugerah Syariah Republik Award 2023

Penyelenggara :
Republika

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023

1. Commendation 1st Year untuk keikutsertaan pertama kali
2. Silver Rank kategori "In Accordance" untuk Sektor Publik

Penyelenggara :
National Center for Corporate Reporting (NCCR)

Anugerah Humas Indonesia 2023

1. Gold Winner Kanal Digital Youtube
2. Bronze Winner kategori Tiktok

Penyelenggara :
Humas Indonesia

Top Digital Awards 2023

- 4 Star Top Digital Implementation
- Top Leader on Digital Implementation
- Top CIO on Digital Implementation

Penyelenggara :
IT Works

Stellar Workplace Award 2023

1. The Best Workplace Award for Small Employer
2. Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment
3. Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction

Penyelenggara :
GML Performance dan Kontan Business & Investment Media

Investor & Client Appreciation

1. The Most Digitalized Partner in Capital Market
2. The Most Innovative Investor in Sharia Financial Market

Penyelenggara :
Bank Syariah Indonesia (BSI)

2024

Badan Pendukung Pengumpulan Zakat Terbaik
BAZNAS Award 2024
Penyelenggara :
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Digital PR Program
Perhumas PR Excellence Awards (PREA) 2024
Penyelenggara :
Perhumas Indonesia

The Best of Government's Social Media
Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2024
Penyelenggara :
Serikat Perusahaan Pers (SPS)

Most Popular Brand of The Year
7 Most Popular Brand of The Year
Penyelenggara :
Jawa Pos

CIO Lembaga Non-Perbankan 2024
iCIO Awards 2024
Penyelenggara :
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

Sustainable Investment Initiative
Anugerah ESG Republik Indonesia 2024
Penyelenggara :
Republika

Corporate Sustainability Award (ICSA) 2024
1. Outstanding Senior Leaders in Sustainability
2. Outstanding Leaders in Sustainability
Penyelenggara :
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

2022/23 Vision Awards
1. Platinum Award for Annual Report
2. Gold Winner
3. Top 100 Reports Worldwide
4. Technical Achievement Award
Penyelenggara :
League of American Communications Professionals (LACP)
Integrated Report Competition Annual Report

Silver Award untuk Sektor Publik
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024
Penyelenggara :
National Center for Corporate Reporting (NCCR)

Investor & Client Appreciation (BSI)
1. Best ESG Investor
2. Most Active Investor
3. First Mover Client in Money Market Transaction Products
Penyelenggara :
BSI

2025

Sustainable Investment Initiative
Anugerah ESG Republik Indonesia 2025
Penyelenggara :
Republika

CIO Lembaga Non-Perbankan 2025
iCIO Awards 2025
Penyelenggara :
iCIO Community



Pelayanan Ibadah Haji

Menunaikan ibadah haji adalah puncak perjalanan spiritual yang dinanti jutaan umat Islam di Indonesia, sebuah cita-cita yang tumbuh dari doa, kesabaran, dan upaya panjang dalam mempersiapkan diri lahir maupun batin. Di balik setiap langkah menuju Tanah Suci, tersimpan harapan agar perjalanan ini berlangsung dengan aman, nyaman, dan bermakna.

Peran BPKH hadir di tengah harapan itu, memastikan setiap rupiah dana umat

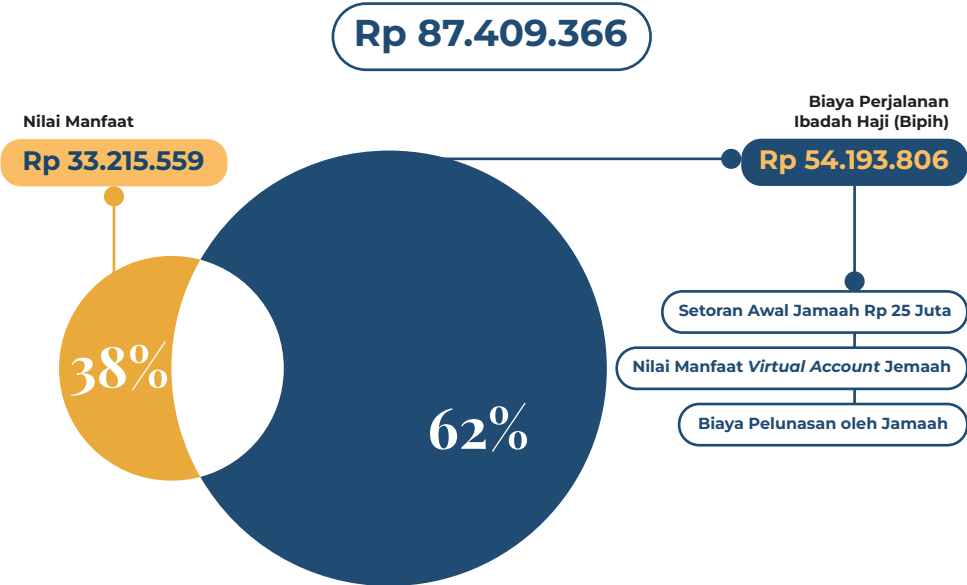
dikelola secara aman, transparan, dan penuh keberkahan. Melalui pengembangan dana haji, pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung, BPKH berupaya menghadirkan pengalaman berhaji yang semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, agar nilai ibadah tak hanya dirasakan di Tanah Suci, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi umat di tanah air.

Nilai Manfaat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Bagi banyak umat Islam di Indonesia, menunaikan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual, melainkan juga impian seumur hidup yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Namun, biaya yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi sebagian calon jemaah. Melalui pengelolaan dana haji yang aman dan produktif, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadirkan solusi nyata. Hasil pengembangan dana haji tidak hanya menjaga nilai keuangan umat, tetapi juga dikembalikan dalam bentuk nilai manfaat yang membantu meringankan biaya keberangkatan jemaah setiap tahunnya.

Pada tahun 2025, pemanfaatan nilai manfaat dana haji ini berhasil mengurangi beban biaya yang harus dibayar jemaah sebesar 38% hingga 70%. Dari total biaya haji sebesar Rp 89 juta per jemaah, BPKH menanggung sekitar Rp 34 juta, sehingga jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp 55 juta, sebagaimana terjadi pada tahun 2024. Melalui kebijakan ini, BPKH tidak hanya membantu lebih banyak umat menunaikan rukun Islam kelima, tetapi juga memastikan pengelolaan dana umat dilakukan secara aman, transparan, dan penuh keberkahan, agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

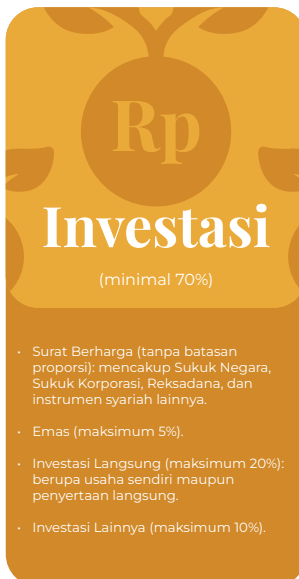


Kinerja Investasi ESG BPKH

Struktur dan Portofolio Sukuk ESG: Memastikan Dana Haji Tetap Tumbuh dan Berkelanjutan

Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), strategi investasi yang ditempuh semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan, yang tercermin melalui portofolio investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Sumber dana kelolaan BPKH berasal dari dua elemen utama, yaitu **Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)** dan **Dana Abadi Umat (DAU)**, yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian

Prinsip Pengelolaan Dana Haji Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengacu pada **Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018**, dengan komitmen terhadap **prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat**. Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi manfaat bagi umat, dana haji dikelola melalui dua skema utama:



Rp
Investasi
(minimal 70%)

- Surat Berharga (tanpa batasan proporsi): mencakup Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, Reksadana, dan instrumen syariah lainnya.
- Emas (maksimum 5%).
- Investasi Langsung (maksimum 20%): berupa usaha sendiri maupun penyertaan langsung.
- Investasi Lainnya (maksimum 10%).



**Penempatan
di Bank**
(maksimal 30%)

yang hanya dilakukan pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menjaga prinsip kepatuhan syariah.

Melalui kebijakan investasi yang terukur dan berprinsip, BPKH berupaya menjaga keberlanjutan, keamanan, serta nilai manfaat dana haji, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian umat. Berikut adalah rincian portofolio investasi BPKH yang mendukung keberlanjutan dana haji pada tahun 2025:



*per September 2025

Alokasi Investasi Dana Kelolaan BPKH

Investasi	Jan25	Feb25	Mar25	Apr25	May25	Jun25	Jul25	Aug25	Sep25
Surat Berharga									
PBSG001	1,890 M	1,890 M	1,890 M	1,890 M	1,890 M	1,890 M	1,890 M	1,890 M	1,890 M
SBSN	121,404 M	122,416	123,157 M	124,207 M	125,884 M	125,281 M	124,326 M	120,571 M	118,676 M
Sukuk Bank BSI	160 M	160 M	160 M	160 M	160 M	340 M	340 M	340 M	340 M
Sukuk PNM	1,073 M	1,073 M	1,073 M	1,073 M	1,073 M	1,073 M	1,573 M	1,573 M	1,573 M
Sukuk Korporasi	1,880 M	1,880 M	1,705 M	1,705 M	1,705 M	1,885 M	1,735 M	1,379 M	1,379 M
Emas									
Emas	3 M	3 M	3 M	19 M	19 M	95 M	125 M	131 M	148 M

Kinerja Investasi ESG BPKH

Mengukir Keberlanjutan: Portofolio BPKH Berbasis ESG

Sebagai bagian dari komitmennya untuk tidak hanya berinvestasi sesuai prinsip syariah, tetapi juga mendorong keberlanjutan jangka panjang, BPKH mengarahkan sebagian portofolio investasinya pada instrumen yang selaras dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Langkah ini sejalan dengan upaya untuk mencapai *United Nations Sustainable Development Goals* (UN SDGs), terutama tujuan terkait energi

bersih, pembangunan berkelanjutan, inklusi sosial, dan ketahanan ekonomi.

Melalui instrumen seperti **Green Sukuk**, **Social Sukuk**, dan **Orange Sukuk**, BPKH memastikan bahwa investasi dana haji tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang terukur bagi lingkungan dan masyarakat.

50%
Green Sukuk
Rp 1.889 m



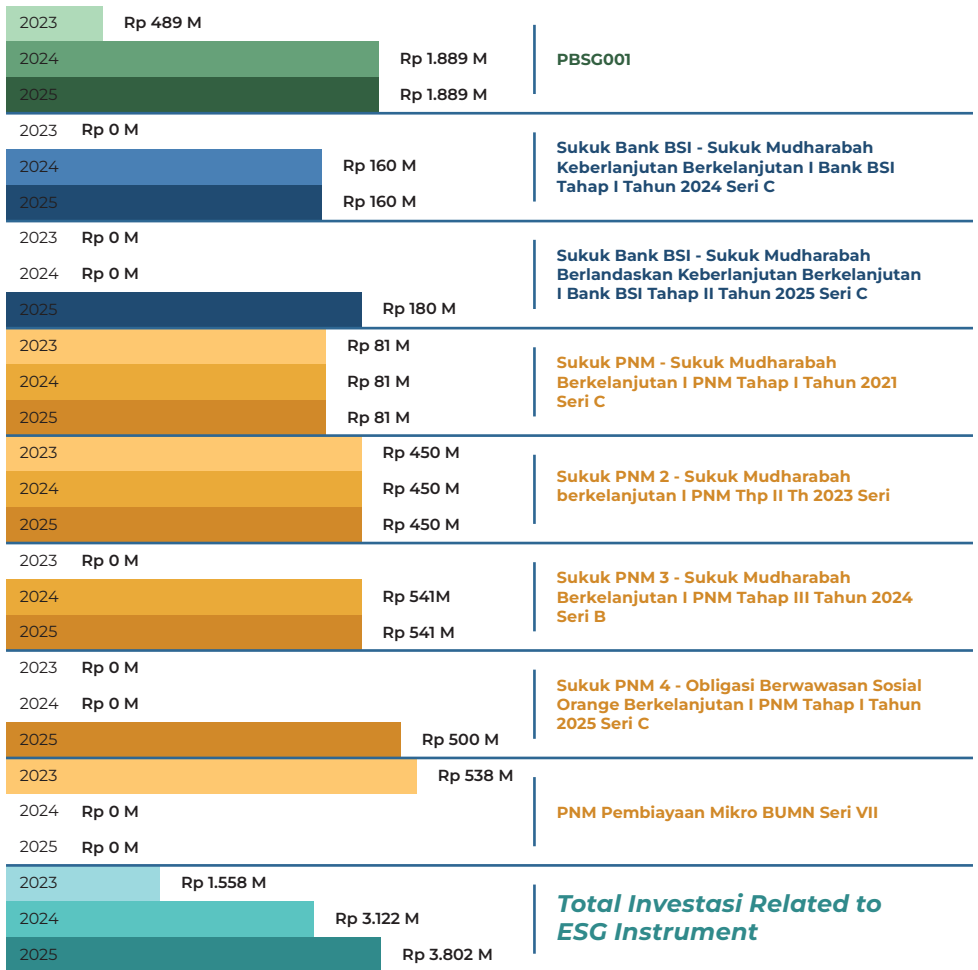
41%
Orange Sukuk
Rp 1.572 m



9%
Social Sukuk
Rp 340 m



Product-Related ESG Instrument





Orange Investment



Investasi Oranye untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Investasi BPKH pada instrumen orange melalui PT Permodalan Madani Nasional (PNM) menjadi salah satu pilar penting dalam strategi keberlanjutan yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi umat, khususnya perempuan prasejahtera. Melalui dukungan pada Sukuk PNM dan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah, BPKH mendorong terciptanya akses permodalan yang inklusif, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta penguatan literasi keuangan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan di berbagai daerah.

Instrumen ini menyalurkan pendanaan pada program pembiayaan ultra mikro seperti Mekaar Syariah, yang memberikan akses permodalan tanpa agunan, pendampingan usaha, dan peningkatan literasi keuangan bagi para pelaku UMKM perempuan di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif ini memperkuat kontribusi BPKH terhadap tujuan sosial ESG sekaligus memastikan nilai

manfaat dana haji diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Partisipasi BPKH dalam instrumen orange memperkuat kontribusi lembaga terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya pada pengurangan kemiskinan (1) melalui perluasan akses permodalan bagi perempuan pra sejahtera tanpa agunan, peningkatan peran perempuan (5) melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok yang mendorong kemandirian dan kapasitas kewirausahaan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (8) dengan penguatan usaha mikro yang produktif dan berkelanjutan, serta pengurangan kesenjangan (10) melalui inklusi keuangan syariah yang menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani perbankan formal.

Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembiayaan UMKM

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata dari pengelolaan dana haji yang berdampak luas bagi masyarakat. Komitmen BPKH dalam mendorong ekonomi umat diwujudkan melalui dukungan terhadap penguatan sektor usaha mikro dan kecil di berbagai daerah.

BPKH melalui tambahan investasi pada Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah serta skema sindikasi pembiayaan bersama bank-bank syariah senilai sekitar Rp500 miliar meningkatkan dukungannya terhadap PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebelumnya, BPKH telah menyalurkan investasi sekitar Rp800 miliar, termasuk untuk mendukung program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah. PNM Mekaar merupakan layanan pembiayaan yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera yang belum memiliki akses permodalan untuk memulai maupun mengembangkan usaha. Program ini dijalankan melalui mekanisme pemberdayaan berbasis kelompok dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai fatwa serta ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penerima manfaat memperoleh dukungan permodalan sekaligus pendampingan usaha yang

terstruktur agar kemampuan ekonomi mereka dapat meningkat secara berkelanjutan. Pemberdayaan ini dijalankan melalui:



Dampaknya mulai terasa di berbagai komunitas, semakin banyak perempuan yang kini mampu mengembangkan usahanya, memperluas jaringan pemasaran, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga serta lingkungan sekitarnya. Inisiatif ini menjadi bagian nyata dari upaya BPKH dalam memperkuat fondasi ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.





“Investasi BPKH pada orange sukuk PNM merupakan wujud nyata penerapan prinsip manfaat dalam mengelola dana umat melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan yang membuka akses usaha bagi perempuan pra sejahtera serta meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga”

Impact Stories

Di berbagai daerah, banyak program bantuan bagi pelaku UMKM hanya berhenti sebagai kegiatan sekali jalan. Setelah pelatihan selesai atau modal awal habis, tidak sedikit usaha kecil yang kembali stagnan bahkan berhenti total. Para pelaku usaha kecil, terutama perempuan pra sejahtera, tetap terjebak dalam lingkaran kesulitan tanpa akses pendampingan, permodalan, dan pendidikan kewirausahaan yang memadai. Kondisi ini menjadi pola berulang hingga akhirnya pemerintah menghadirkan solusi strategis melalui Pembiayaan Nasional Madani (PNM). Kehadiran PNM yang didukung pendanaan dari BPKH, menjadi titik balik penting. PNM dirancang pemerintah sebagai solusi jangka panjang untuk membuka akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia khususnya perempuan pra sejahtera. Hasil usaha mereka dapat membantu kesejahteraan masing masing keluarga. Jika penghasilan wanita pra sejahtera mengalami peningkatan maka tak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari

namun mereka juga bisa menabung dan melanjutkan kehidupan mereka menjadi lebih baik dari hari kemarin.

Mekuar menyasar pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha. Program bantuan PNM Mekar telah menyalurkan bantuan dengan nominal Rp2 juta hingga Rp5 juta, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Saat ini melalui program Mekar Plus bantuan bisa cair hingga Rp15 juta. Namun jika usahanya makin berkembang maka bantuan PNM Mekar Plus bisa bertambah hingga Rp25 juta. Dengan modal pinjaman sebesar ini, tentu para perempuan pelaku usaha sangat terbantu dengan adanya program PNM Mekar Plus.



Orange Investment





Green Investment



Investasi Hijau untuk Keberlanjutan Ekosistem

Green Sukuk merupakan bagian dari SBSN yang dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan berkelanjutan. Instrumen ini memastikan bahwa pembiayaan pemerintah diarahkan pada kegiatan yang menjaga kelestarian alam, mendorong energi bersih, dan meningkatkan kualitas ekosistem secara bertahap. Dengan prinsip syariah dan tata kelola yang transparan, *Green Sukuk* menjadi sarana penting untuk memastikan pengelolaan dana publik berlangsung aman dan bertanggung jawab.

Bagi BPKH, penempatan dana pada SBSN *Green Sukuk* adalah ikhtiar menghadirkan manfaat yang melampaui kepentingan manusia semata. Investasi ini membantu menjaga keseimbangan lingkungan,

memperkuat ketahanan alam, dan menghadirkan warisan yang lebih hijau bagi generasi mendatang. Melalui *Green Sukuk*, BPKH memastikan bahwa dana umat berkembang dengan tetap memberikan nilai yang relevan bagi masa depan.

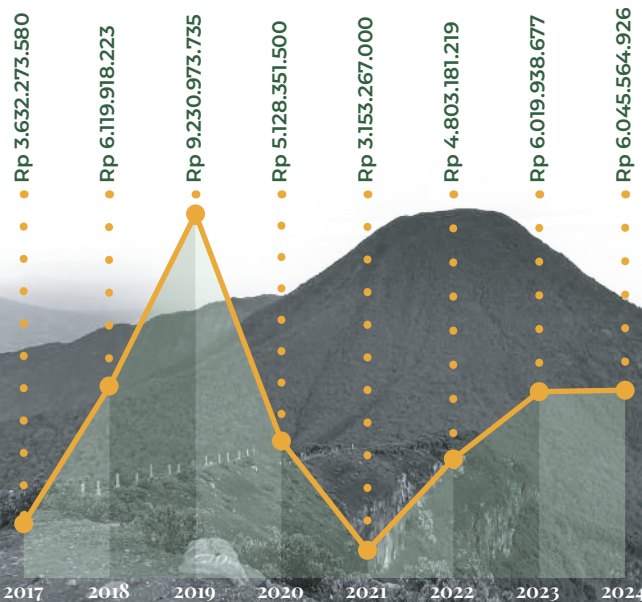
Melalui pengelolaan dana pada instrumen ini, BPKH memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian SDGs, khususnya aksi iklim (13) melalui pembiayaan konservasi dan proyek energi surya, pengembangan energi bersih dan terjangkau (7) melalui peningkatan akses energi terbarukan, kota dan permukiman berkelanjutan (11) melalui pengembangan fasilitas ekowisata yang tertata, serta perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati (15) melalui perlindungan spesies endemik.

Pemanfaatan Investasi untuk Penguatan Konservasi (SBSN Gunung Gede Pangrango)

Melalui skema pembiayaan SBSN, BPKH turut berperan dalam memperkuat upaya konservasi taman nasional di Indonesia.

Pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima dana SBSN total sebesar Rp 51 miliar yang dialokasikan ke tiga taman nasional yang salah satunya untuk mendukung penguatan konservasi di kawasan hutan paling penting di Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Proyek ini mencakup revitalisasi fasilitas wisata alam di Mandalawangi, Situ Gunung, Selabintana dan penataan bumi perkemahan, pembangunan gazebo, *tourism information center*, musholla, jalur setapak, kantin, hingga MCK dengan total realisasi mencapai Rp 25,05 miliar. Pada 2020, TNGGP kembali memperoleh dukungan SBSN sebesar Rp 5,1 miliar untuk pembangunan tempat perlindungan elang jawa sebagai spesies endemik yang terancam punah.

Serangkaian investasi ini, membuka peluang ekonomi baru bagi warga melalui usaha wisata alam, pemandu lokal, hingga UMKM berbasis ekowisata. Di sisi lain, kualitas konservasi meningkat mulai dari kontrol pengunjung menjadi lebih tertib, tekanan terhadap satwa liar berkurang, hingga edukasi publik tentang lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif. Proyek yang dibiayai SBSN turut mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Satuan Kerja Gunung Pangrango, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan bisa mencapai 7% setiap tahun. Hal ini menjadi bukti bahwa dana umat dapat menghadirkan nilai tambah untuk menjaga alam sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan.



Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk



6,58%

Investasi melalui SBSN Proyek Energi Surya

Investasi BPKH melalui SBSN berkontribusi langsung pada percepatan transisi energi nasional, termasuk pembiayaan proyek energi surya berkapasitas 100 MW di Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari portofolio investasi berkelanjutan yang dirancang untuk memberikan imbal hasil stabil dan seimbang yang menghadirkan manfaat lingkungan melalui pengurangan emisi dan

peningkatan akses energi bersih. Komitmen Proyek Energi Surya ini menjadi salah satu bentuk portofolio energi terbarukan yang mendukung program keberlanjutan *Net-Zero Emission* pemerintah. BPKH meyakini bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari amanah untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.



Social Investment



Investasi Sosial untuk Kemaslahatan Umat

BPKH memperkuat portofolio investasi sosial melalui penempatan pada instrumen Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Instrumen ini dirancang untuk mendukung pembiayaan yang memberikan dampak sosial terukur, mulai dari peningkatan akses layanan keuangan syariah hingga penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Melalui investasi pada Sukuk BSI, BPKH memastikan bahwa dana umat tidak hanya dikelola secara aman dan produktif, tetapi juga berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan, pembangunan ekonomi yang lebih merata, serta peningkatan kualitas layanan perbankan syariah. Pendekatan ini

sejalan dengan mandat BPKH untuk menghadirkan manfaat jangka panjang bagi jemaah dan masyarakat, sekaligus mendukung ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

BPKH mendukung pencapaian TPB (SDGs) melalui investasi pada *Sustainability Sukuk* BSI, khususnya pendidikan berkualitas (4) melalui peningkatan akses dan fasilitas bagi puluhan ribu pelajar, kehidupan sehat dan sejahtera (3) lewat penguatan pelayanan kesehatan dasar yang lebih terjangkau, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (8) melalui pemberdayaan UMKM dan usaha mikro.

Mendorong Inklusi dan Manfaat Sosial melalui Sukuk BSI

Pada Juni 2024, BPKH memperkuat portofolio investasinya pada instrumen Social Sukuk BSI dengan penempatan sebesar Rp160 miliar. Komitmen ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2025 melalui tambahan investasi Rp180 miliar, sehingga total nilai investasi social sukuk yang ditempatkan BPKH mencapai Rp340 miliar. *Social Sukuk* BSI ini disalurkan untuk mendukung berbagai program yang memberikan manfaat sosial, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah (SME), ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui instrumen ini,

pembiayaan sosial seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro, dan layanan akses keuangan bagi kelompok rentan dapat diperluas. Pada 2025, BPKH memperkuat komitmen pembiayaan sosial dengan meningkatkan investasi pada *Sustainability Sukuk* BSI, yang turut mencakup porsi pembiayaan *Social Sukuk*. Instrumen ini diarahkan untuk memperluas akses layanan dasar serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan sosial melalui sukuk ini memberikan manfaat langsung di tiga sektor utama:

Akses Pendidikan

80.000

PELAJAR

Mendapatkan peluang belajar lebih layak

Pendanaan Social Sukuk membantu peningkatan layanan pendidikan bagi **80.000 pelajar** melalui penyediaan fasilitas yang lebih layak dan dukungan bagi **152 lembaga pendidikan**. Hal ini memperkuat kapasitas sekolah untuk menyediakan layanan yang lebih merata bagi siswa dari berbagai latar belakang;

Layanan Kesehatan

168.000

Penerima Manfaat

Mendapatkan kualitas layanan dasar

Di sektor kesehatan, *Social Sukuk* memperluas akses layanan dasar bagi **168.000** penerima manfaat, melalui **78 fasilitas kesehatan**. Dukungan pembiayaan ini meningkatkan kemampuan lembaga kesehatan untuk memberikan layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat; dan

Pemberdayaan Ekonomi

77
UMKM

557
Pelaku Usaha Mikro

Pembiayaan sosial juga diarahkan untuk mendukung penguatan mata pencaharian. Sukuk ini membantu **77 UMKM dan 557 pelaku usaha mikro** dalam memperoleh modal dan pendampingan usaha. Upaya ini diperkuat dengan fasilitasi bagi **100 usaha** di sektor perikanan, peternakan, dan pengolahan pangan, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi lokal.



RS Waka Achmad Wardi

RS Waka Achmad Wardi

Investasi Penunjang Nilai Manfaat



Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen investasi sosial syariah yang menggabungkan konsep wakaf uang dengan sukuk negara, sehingga nilai pokok wakaf tetap terjaga sementara imbal hasilnya dimanfaatkan untuk program kemaslahatan umat. Melalui CWLS, dana wakaf dikelola secara produktif, transparan, dan berkelanjutan, menjadikannya sarana strategis untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya berorientasi pada imbal hasil finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang nyata dan terukur.

Salah satu wujud konkret pemanfaatan CWLS oleh BPKH adalah pembangunan Retina Center di RS Mata Achmad Wardi, Serang, Banten, rumah sakit mata pertama di Asia yang berbasis wakaf. Lebih dari sekadar infrastruktur kesehatan, pusat layanan ini merepresentasikan pertemuan antara spiritualitas wakaf dan misi

kemanusiaan, di mana dana umat diolah menjadi harapan baru bagi mereka yang selama ini terhalang keterbatasan akses dan biaya pengobatan.

Melalui pengelolaan CWLS sebagai instrumen wakaf produktif, BPKH memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian TPB (SDGs), khususnya kehidupan sehat dan sejahtera (3) melalui layanan kesehatan mata gratis, pengentasan kemiskinan (1) dengan meringankan beban biaya pengobatan masyarakat dhuafa, pengurangan kesenjangan (10) melalui perluasan akses layanan berkualitas bagi kelompok rentan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan (17) melalui kolaborasi strategis bersama BWI, Kementerian Keuangan, dan para wakif, sehingga manfaat wakaf tercipta secara berkelanjutan dan berkeadilan.

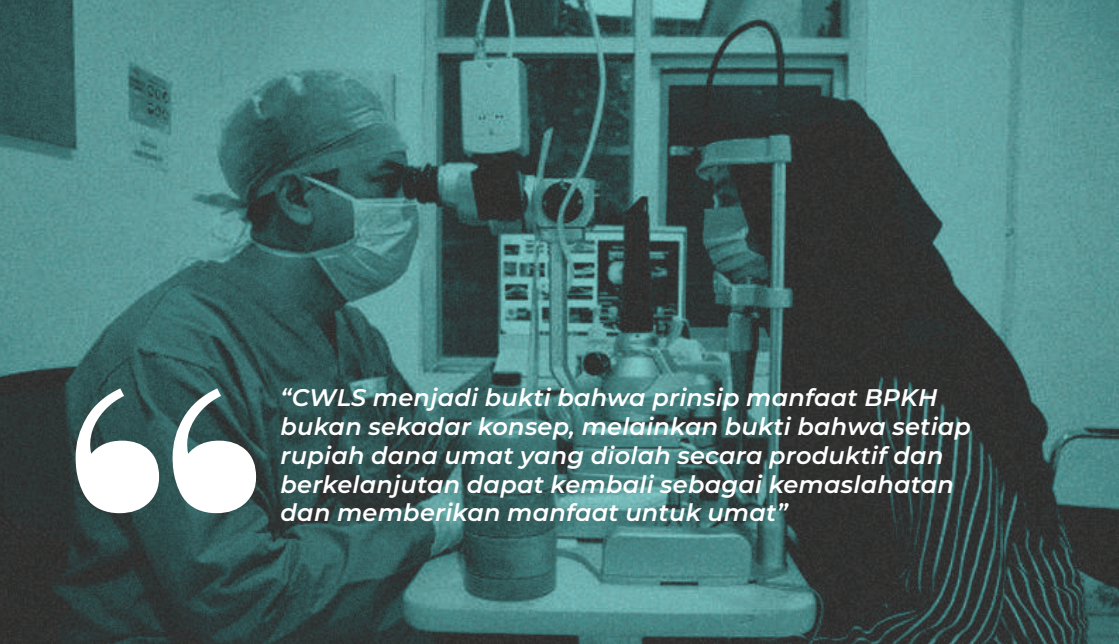
RS Mata Achmad Wardi: Investasi Wakaf Menjadi Manfaat untuk Ribuan Mata

Di Serang, Banten, berdiri RS Mata Achmad Wardi, rumah sakit mata pertama di Asia yang berbasis wakaf. Berkat kolaborasi antara BPKH, Kementerian Keuangan, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) rumah sakit ini kini memiliki Retina Center yang dilengkapi peralatan modern dari Jerman. *Retina Center* ini merupakan salah satu fasilitas yang pembangunannya dibiayai dari program *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. CWLS merupakan instrumen wakaf produktif yang menjaga nilai pokok wakaf dan di waktu yang bersamaan juga menyalurkan imbal hasilnya untuk program kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dibangunnya *Retina Center* di RS Mata Achmad Wardi ini memberi harapan baru

bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan mata.

Setiap bulan, rumah sakit ini melayani 10 hingga 15 operasi katarak gratis bagi masyarakat dhuafa yang tidak memiliki BPJS atau kemampuan finansial untuk berobat. Melalui dukungan imbal hasil CWLS, pelayanan tersebut bisa terus berjalan tanpa biaya bagi pasien, bahkan termasuk layanan antar-jemput dari rumah. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana dana umat, ketika dikelola secara produktif dan berlandaskan prinsip ESG, dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mengembalikan penglihatan, membuka kesempatan, dan menumbuhkan harapan.





“CWLS menjadi bukti bahwa prinsip manfaat BPKH bukan sekadar konsep, melainkan bukti bahwa setiap rupiah dana umat yang diolah secara produktif dan berkelanjutan dapat kembali sebagai kemaslahatan dan memberikan manfaat untuk umat”

Impact Stories

Melalui dana investasi yang dikelola secara amanah, BPKH hadir dalam program kemaslahatan dan menjadi pionir dalam pemanfaatan instrumen *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) untuk program kesehatan khususnya pembangunan *Retina Center* di RS Mata Achmad Wardi. Rumah sakit ini menjadi rumah sakit mata satu-satunya di Provinsi Banten yang memiliki Katarak Center sejak tahun 2018. Dengan dukungan dana dari optimalisasi CWLS Ritel BPKH, pengembangan *Retina Center* menjadikan RS Achmad Wardi sebagai pusat layanan pengobatan dan perawatan mata yang semakin komprehensif, khususnya bagi masyarakat dhuafa. Terdapat lebih dari 2513 pasien dhuafa yang mendapatkan pelayanan operasi mata gratis dari hasil CWLS.

Dukungan ini dilakukan melalui skema wakaf temporer yang disalurkan BPKH ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), kemudian oleh BWI diinvestasikan dalam sukuk negara

(SBSN) di Kementerian Keuangan. Dari optimalisasi imbal hasil CWLS inilah layanan operasi mata gratis bagi masyarakat prasejahtera dapat dijalankan secara berkelanjutan. BPKH berkontribusi sebesar Rp25 miliar, dari total kebutuhan dana Rp50 miliar sekaligus memobilisasi wakif dari berbagai lembaga keuangan mitra BPS-BPIH. CWLS Ritel memberikan fasilitas bagi masyarakat, baik individu maupun institusi, untuk berwakaf uang secara aman, produktif, dan tepat sasaran. Instrumen ini dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah: tanpa riba, ketidakjelasan (*gharar*), maupun judi (*maysir*) dan tentunya memberi kontribusi langsung kepada ekonomi kerakyatan. Dari instrumen keuangan syariah yang inovatif ini, ribuan orang yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan kini dapat melihat kembali. BPKH dan para wakif bukan hanya membangun layanan kesehatan tetapi juga sedang mengembalikan harapan, satu pasang mata demi satu pasang mata.

Project-Based Sukuk (PBS)



Project Based Sukuk merupakan instrumen investasi syariah berbasis proyek yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Melalui skema ini, BPKH menempatkan dana haji pada proyek-proyek yang tidak hanya aman dan produktif, tetapi juga memberikan manfaat sosial langsung bagi umat.

Melalui *Project Based Sukuk*, BPKH mengelola dana haji sebagai instrumen strategis untuk memperkuat infrastruktur ibadah, pelayanan keagamaan, serta pengembangan pendidikan umat. Setiap proyek yang didanai tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga ruang kebermanfaatannya yang meningkatkan

kualitas pelayanan haji, memperluas akses pembinaan keagamaan, dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih layak dan berdaya saing.

BPKH mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pendidikan berkualitas (4) melalui pembangunan sarana pendidikan keagamaan, kota dan permukiman berkelanjutan (11) melalui penguatan infrastruktur layanan haji yang layak, serta kemitraan untuk mencapai tujuan (17) melalui sinergi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait, sehingga investasi dikelola secara aman, produktif, dan berdampak sosial berkelanjutan..



Sosial Keagamaan

BPKH memandang pelayanan sosial keagamaan sebagai bagian penting dalam memperkuat kualitas ibadah dan kesejahteraan umat. Melalui optimalisasi pengelolaan dana haji yang produktif, BPKH mendukung pembangunan beragam fasilitas keagamaan yang berperan langsung dalam pembinaan, pelayanan, dan pendampingan jemaah. Dukungan ini mencakup pembangunan Kantor Urusan Agama, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu, hingga revitalisasi Asrama Haji di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai inisiatif sosial keagamaan tersebut

tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang lebih layak dan modern, tetapi juga memperkuat ekosistem pelayanan umat secara menyeluruh. Mulai dari pembinaan manasik, layanan administrasi, hingga persiapan keberangkatan, seluruh proses dapat dilakukan dengan lebih baik dan terstandar. Investasi ini menunjukkan bahwa dana umat dikelola untuk menghadirkan manfaat sosial yang luas, meningkatkan kualitas layanan keagamaan, serta memastikan pengalaman haji yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat bagi jemaah.



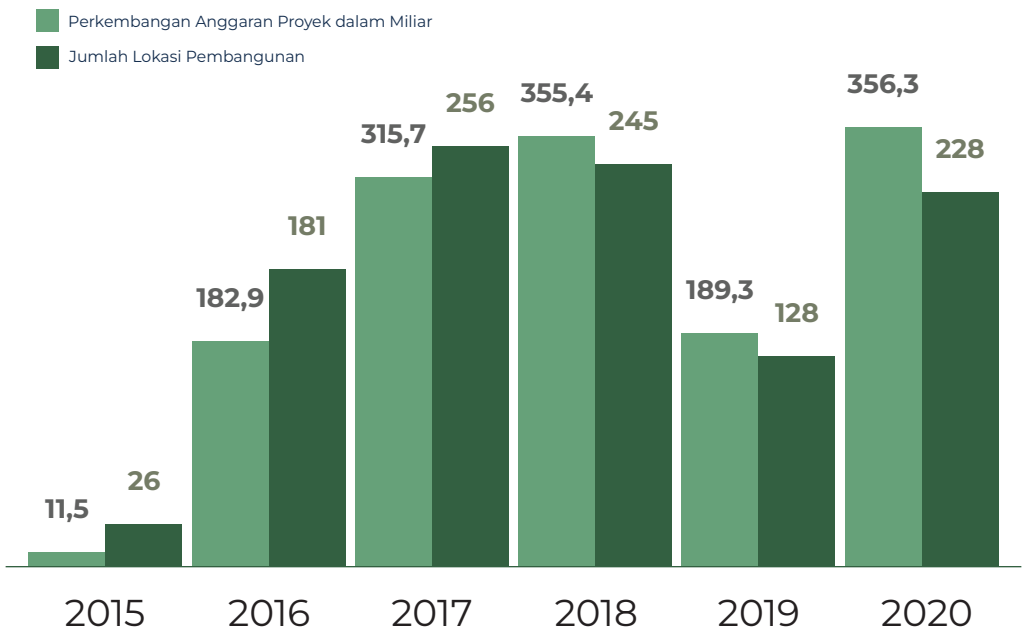
Memperkuat Pembinaan Ibadah

Perjalanan haji dimulai jauh sebelum menginjak Tanah Suci, dimulai dari pembinaan dan manasik di tanah air. Di sinilah Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting sebagai tempat pertama calon jemaah belajar, berlatih, dan memahami makna ibadah haji secara utuh. KUA berkedudukan di wilayah kecamatan yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Melalui proyek pembangunan KUA dan manasik haji yang bersumber dari SBSN, BPKH berupaya untuk memperkuat kualitas

pembinaan haji dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak, nyaman, dan representatif. Pembangunan serta revitalisasi fasilitas manasik ini tidak hanya memperindah bangunan fisik, melainkan juga meningkatkan kapasitas pelayanan, sehingga calon jemaah dapat mempersiapkan diri lebih baik secara pengetahuan, spiritual, maupun mental.

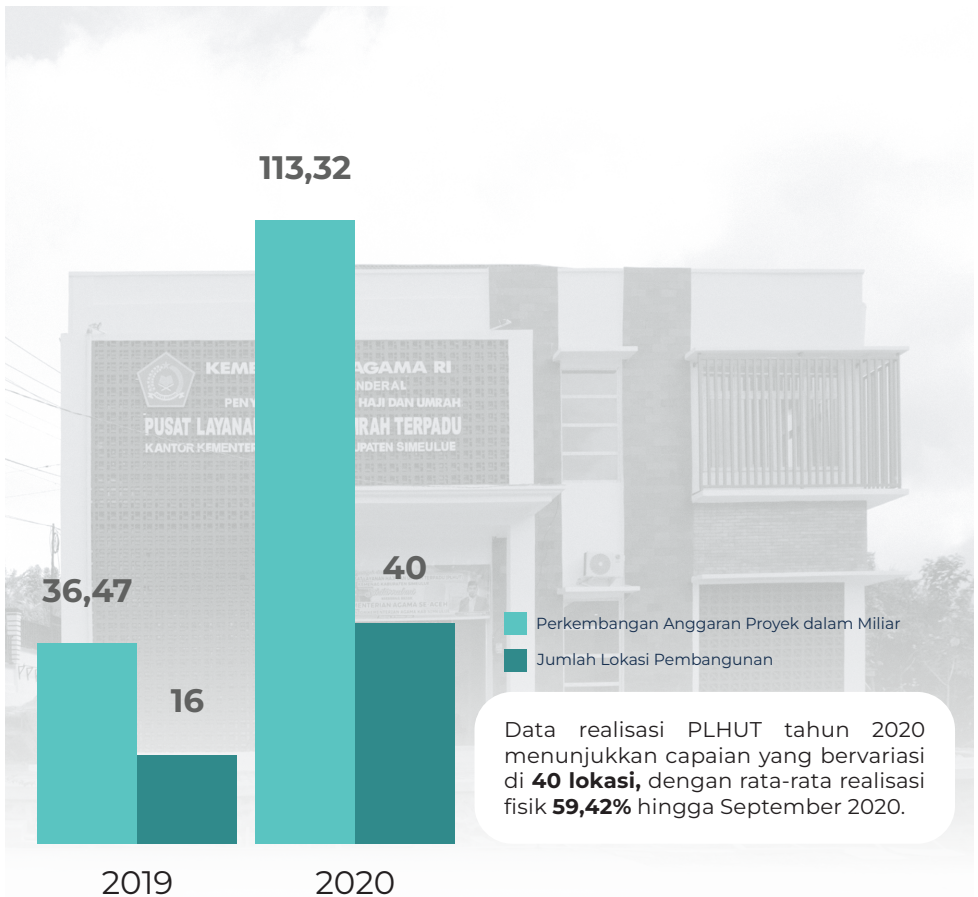
Berikut adalah perkembangan alokasi anggaran pembangunan balai nikah dan manasik haji melalui pembiayaan SBSN pada periode 2015–2020 di 34 provinsi di Indonesia.



Memperkuat Pelayanan Haji melalui Proyek SBSN PLHUT

Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) merupakan program prioritas Kementerian Agama yang dibiayai melalui SBSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah. Sejalan dengan UU No. 8/2019, PLHUT dirancang sebagai layanan satu pintu yang menyatukan proses pendaftaran, pelunasan BPIH, konsultasi, bimbingan manasik, serta layanan informasi umrah dalam satu lokasi.

Melalui dukungan pembiayaan SBSN, proyek PLHUT menyediakan fasilitas yang lebih modern, terstandar, dan mudah diakses, sehingga calon jemaah memperoleh layanan yang lebih cepat, nyaman, dan terjamin. Program ini menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan publik bidang keagamaan, sekaligus memperkuat perlindungan dan pembinaan jemaah di seluruh Indonesia.





Peningkatan Infrastruktur Haji dengan Pembiayaan SBSN

BPKH terus mengoptimalkan pemanfaatan dana haji agar setiap rupiah dari pembiayaan berbasis sukuk negara (SBSN) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan haji. Melalui proyek pembangunan dan revitalisasi asrama haji di berbagai kota menunjukkan bahwa dana haji yang BPKH kelola dapat dirasakan manfaatnya oleh jamaah di berbagai kota di Indonesia. Setiap ruang yang diperbaiki, setiap fasilitas yang diperbarui adalah bentuk nyata dari pengelolaan dana umat yang transparan.

Asrama haji memegang peranan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tingkat daerah. Asrama haji bukan hanya tempat bermalam bagi calon jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci, tetapi juga sebagai pusat akomodasi dan pelayanan terpadu yang memastikan setiap jamaah mendapatkan pengalaman haji yang layak dan nyaman. Di sinilah proses penting

dilakukan, mulai dari pembekalan manasik, pemeriksaan administrasi dan kesehatan, hingga pengaturan logistik keberangkatan. Asrama haji juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan umat, mencakup fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi yang dikelola secara islami dan berlandaskan prinsip syariah.

Melalui dukungan SBSN, revitalisasi asrama haji menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pelayanan umat. Selain meningkatkan kualitas fasilitas, pengembangan ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui optimalisasi pemanfaatan aset negara, seperti penyewaan aula, ruang pertemuan, dan penginapan di luar musim haji. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara investasi keuangan syariah dan pelayanan sosial keagamaan sehingga menghadirkan kebermanfaatn yang berkelanjutan bagi jamaah dan masyarakat luas.

Sepanjang tahun 2014–2020 Kementerian Agama telah melaksanakan proyek revitalisasi asrama haji senilai Rp2,3 triliun untuk 64 proyek di 30 asrama haji. Berikut alokasi anggaran proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji yang dibiayai SBSN tahun 2014-2020.

- Perkembangan Anggaran Proyek dalam Miliar
- Jumlah Lokasi Pembangunan



Nanggroe Aceh Darussalam

Asrama Haji Banda Aceh
SBSN 2015 & 2019
Total Rp. 15,69 Miliar

Kalimantan Tengah

Asrama Haji Palangkaraya
SBSN 2016 & 2019
Total Rp. 51,30 Miliar

Sumatra Utara

Asrama Haji Medan
SBSN 2014, 2015, 2017, 2018
Total Rp. 148,65 Miliar

Kalimantan Barat

Asrama Haji Pontianak
SBSN 2020
Total Rp. 15,00 Miliar

Kalimantan Selatan

Asrama Haji Banjarmasin
SBSN 2016 & 2018
Total Rp. 110,05 Miliar

Jambi

Asrama Haji Jambi
SBSN 2016
Total Rp. 57,6 Miliar

Bangka Belitung

Asrama Haji Bangka Belitung
SBSN 2017 & 2019
Total Rp. 70,43 Miliar

Sumatera Barat

Asrama Haji Tabing
SBSN 2014 & 2019
Total Rp 48,58 Miliar

Asrama Haji Pariaman
SBSN 2015, 2017, 2018, 2019 & 2020
Total Rp 231,66 Miliar

Bengkulu

Asrama Haji Bengkulu
SBSN 2016 & 2020
Total Rp. 106,85 Miliar

Lampung

Asrama Haji Lampung
SBSN 2018
Total Rp. 52,59 Miliar

DKI Jakarta

Asrama Haji Pondok Gede
SBSN 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
Total Rp. 57,6 Miliar

Jawa Barat

Asrama Haji Bekasi
SBSN 2016 & 2017
Total Rp. 117,5 Miliar

Asrama Haji Indramayu
SBSN 2020
Total Rp. 75,0 Miliar

Jawa Timur

Asrama Haji Surabaya
SBSN 2017, 2018 & 2019
Total Rp. 134,98 Miliar

DIY

Asrama Haji Yogyakarta
SBSN 2015
Total Rp. 10 Miliar

Kalimantan Timur

Asrama Haji Balikpapan
SBSN 2014, 2015, 2017, 2019
Total Rp. 110,71 Miliar

Sulawesi Utara

Asrama Haji Sulawesi Utara
SBSN 2017, 2019 & 2020
Total Rp. 62,86 Miliar

Sulawesi Barat

Asrama Haji Mamuju
SBSN 2019
Total Rp. 26,50 Miliar

Sulawesi Tengah

Asrama Haji Sulawesi Tengah
SBSN 2017
Total Rp. 46,8 Miliar

Gorontalo

Asrama Haji Gorontalo
SBSN 2016, 2019, 2020
Total Rp. 85,94 Miliar

Maluku Utara

Asrama Haji Maluku Utara
SBSN 2017 & 2020
Total Rp. 52,11 Miliar

Papua Barat

Asrama Haji Papua Barat
SBSN 2019
Total Rp. 14,25 Miliar

Sulawesi Selatan

Asrama Haji Makassar
SBSN 2015, 2016,
2018 & 2019
Total Rp. 117,5 Miliar

Sulawesi Tenggara

Asrama Haji Kendari
Sulawesi Tenggara SBSN
2020
Total Rp. 37,05 Miliar

Maluku

Asrama Haji Maluku
SBSN 2018
Total Rp. 61,07 Miliar

Papua

Asrama Haji Papua
SBSN 2017 & 2020
Total Rp. 30,63 Miliar

NTB

Asrama Haji Lombok
SBSN 2015 & 2020
Total Rp. 86,25 Miliar

NTT

Asrama Haji Kupang
SBSN 2019
Total Rp. 27,72 Miliar



Pendidikan dan Dakwah

BPKH meyakini bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan umat. Melalui pengelolaan dana haji yang produktif, termasuk pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), BPKH berperan aktif dalam memperkuat ekosistem pendidikan di Indonesia. Dukungan ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana di berbagai tingkatan dari mulai madrasah hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

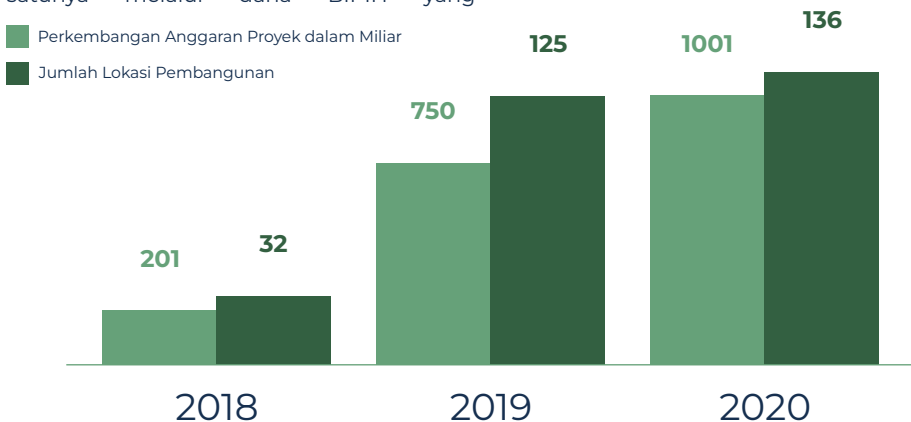
Berbagai proyek pembangunan sarana pendidikan ini tidak hanya menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak, tetapi juga membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan daya saing mereka. Investasi ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif untuk memastikan dana umat memberikan manfaat luas dan berjangka panjang bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Pendidikan yang Memadai

Madrasah adalah pilar penting dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagai lembaga pendidikan yang memadukan ilmu agama dengan pengetahuan umum, madrasah membutuhkan sarana dan prasarana yang layak agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

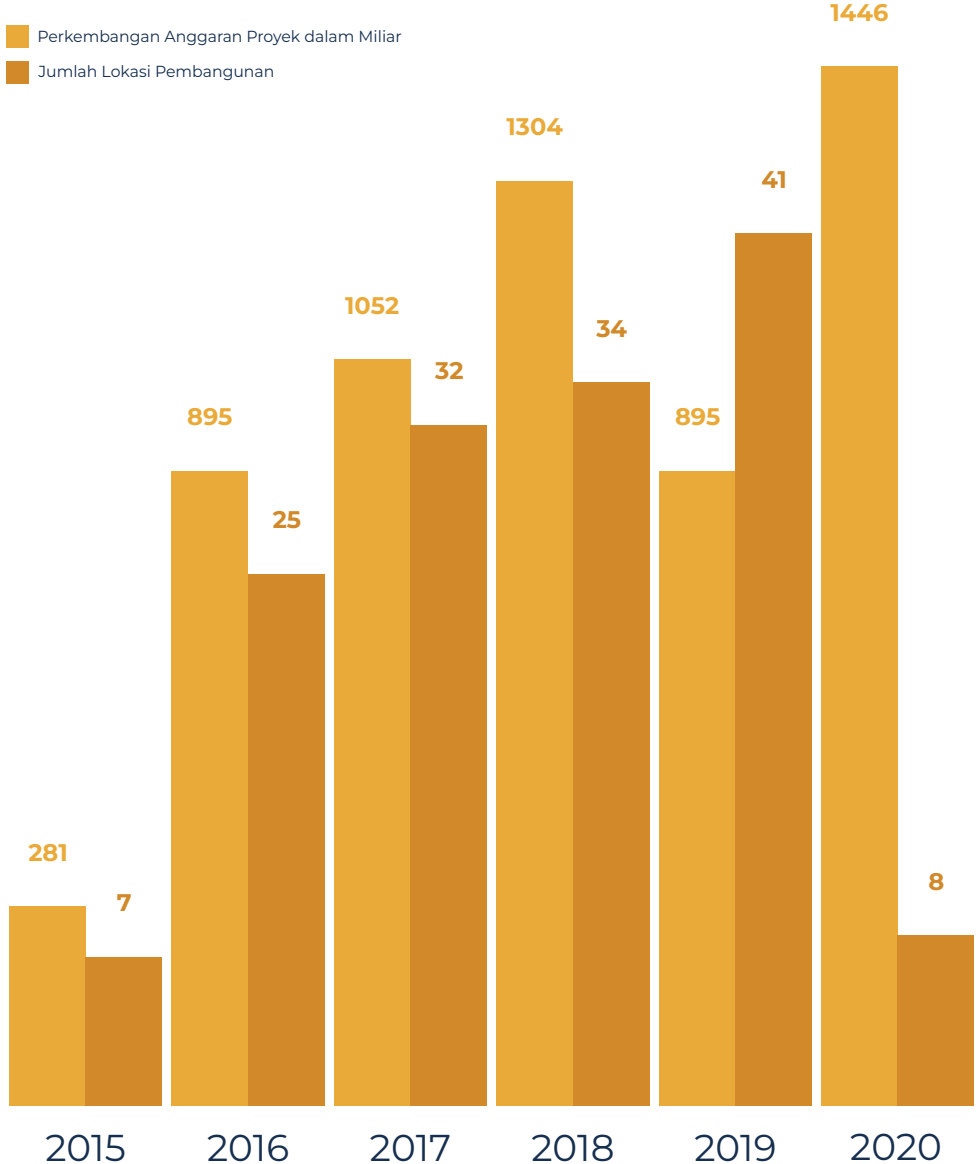
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, digunakan berbagai skema pendanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya melalui dana BIPIH yang

diinvestasikan pada SBSN. Melalui pendanaan inilah, pembangunan sarana dan prasarana dari level Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Inisiatif ini selaras dengan arah kebijakan dalam visi, misi, dan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2020–2024, yang menekankan peningkatan kualitas, relevansi, serta daya saing pendidikan madrasah di Indonesia.



Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi negara, sehingga perlu upaya serius untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Sepanjang tahun 2015-2020 Kementerian Agama melalui

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membangun sarana dan prasarana PTKIN senilai Rp5,89 triliun dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Anggaran proyek peningkatan sarana dan prasarana PTKIN tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.





Nanggroe Aceh Darussalam

1. UIN Ar-Raniry
2. IAIN Zawiyah CKL
3. IAIN Malikussaleh
4. STAIN Gajah Putih
5. STAIN T. Dirundeng M

Sumatera Utara

1. UIN Sumatera Utara
2. IAIN Padangsidimpuan
3. STAIN Mandailing Natal

Sumatera Barat

1. UIN Imam Bonjol
2. IAIN Batusangkar
3. IAIN Bukittinggi

Sumatera Selatan

UIN Raden Fatah

Riau

1. UIN S.S. Kasim
2. STAIN Al Kautsar

Jambi

UIN S.T. Saifuddin

Bengkulu

1. IAIN Bengkulu
2. STAIN Curup

Bangka Belitung

STAIN S.A. Siddik

Lampung

1. UIN Raden Intan
2. IAIN Jura'i Siwo

Banten

UIN S. Maulana Hasanuddin

DKI Jakarta

UIN S. Hidayatullah

Jawa Barat

1. UIN S. Gunung Djati
2. IAIN Syekh Nurjati

Jawa Tengah

1. UIN Walisongo
2. IAIN Purwokerto
3. IAIN Salatiga
4. IAIN Surakarta
5. IAIN Pekalongan
6. STAIN Kudus

Jawa Timur

1. UIN M.M. Ibrahim
2. UIN S. Ampel
3. IAIN Jember
4. IAIN Tulungagung
5. IAIN Ponorogo
6. STAIN Kediri
7. STAIN Pamekasan



Kalimantan Barat	IAIN Pontianak	Sulawesi Tenggara	IAIN S. Qaimuddin
Kalimantan Tengah	IAIN Palangka Raya	Sulawesi Utara	IAIN Manado
Kalimantan Timur	IAIN Samarinda	Gorontalo	IAIN Sultan Amal
Kalimantan Selatan	UIN Antasari	Maluku	IAIN Ambon
Sulawesi Barat	STAIN Majene	Maluku Utara	IAIN Ternate
Sulawesi Tengah	IAIN Datokarama	Papua	STAIN Al-Fattah
Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Alauddin Makassar 2. IAIN Palopo 3. STAIN Watampone 4. STAIN Parepare 	Papua Barat	STAIN Sorong





“Investasi pada sektor pendidikan merupakan wujud komitmen BPKH dalam memperluas akses serta menghadirkan sarana pendidikan yang lebih layak dan inklusif, dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar setiap dana umat dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.”

Impact Stories

Setiap bangunan yang berdiri tidak hanya menghadirkan ruang belajar baru, tetapi juga menjadi simbol nyata dari amanah pengelolaan dana umat yang berdampak luas. Dari ruang kelas hingga pusat riset, manfaatnya kini dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Salah satu contohnya terlihat dari pembangunan fasilitas di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang menghadirkan dampak signifikan terhadap penguatan riset dan pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.

Sebagai upaya untuk memperkuat mutu pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia, dana investasi BPKH yang disalurkan melalui SBSN digunakan untuk pembangunan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Melalui surat Menteri Keuangan nomor S-45/MK.8/2018 tanggal 16 April 2018 perihal “Pengalihan Sumber Pembiayaan Proyek *Development and Improvement of Six Islamic Higher Education Institutions* (6in1) Kementerian Agama”, pemerintah dengan menggunakan SBSN Proyek melakukan pembiayaan pembangunan fisik dengan komponen yang dapat dibiayai yaitu 1) Gedung dan Infrastruktur; 2) Manajemen Konstruksi (MK); 3) Meubelair; 4) Peralatan; dan 5) Administrasi Proyek. Satu dari enam

PTKIN dalam lingkup 6in1 adalah Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan pendanaan SBSN senilai lebih dari Rp592 miliar pada tahun 2019-2022.

Melalui proyek ini, berdirilah berbagai fasilitas modern seperti gedung fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas psikologi dan ilmu kesehatan, laboratorium sains dan teknologi, laboratorium keagamaan, serta gedung terpadu yang menaungi perpustakaan dan layanan akademik. Tak hanya bangunan fisik, pengadaan peralatan seperti laboratorium, ruang kelas, dan infrastruktur IT turut mendorong transformasi sistem pembelajaran yang lebih terintegrasi antara ilmu keislaman dan sains modern.

Secara akademik, UIN Sunan Ampel melesat dengan akreditasi unggul BAN-PT, peringkat ke-3 PTKIN terbaik versi UniRank, dan posisi pertama nasional di EduRank. Selain itu, geliat ekonomi warga ikut tumbuh dengan membangun usaha kos, warung makan, *laundry* hingga fotokopian. Pembangunan melalui dana SBSN ini bukan sekadar mendirikan gedung, tetapi juga turut menumbuhkan kehidupan ekonomi dan keberdayaan masyarakat sekitar.



Jejak Manfaat



- Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023



- Sustainable Investment Initiative Anugerah ESG Republika 2023



- CIO Lembaga Non-Perbankan 2023 iCIO Awards 2023



- Investor & Client Appreciation (BSI) 2024
 1. Best ESG Investor
 2. Most Active Investor
 3. First Mover Client in Money Market Transaction Products



- Sustainable Investment Initiative Anugerah ESG Republika 2024



● ITB Science Techno Park



● KUA Lombok Barat



● Gunung Gede Pangrango



● PLHUT Lombok Barat



● RNM Mekaar



● PLHUT Lombok Timur



Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18,
Jakarta Selatan/South Jakarta 12940

Website: www.bpkh.go.id
WA Call Center: +62 821-9090-6002

Email: info@bpkh.go.id
Hunting: (021) 837 93001